

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

Judul : PERANAN GURU PPKn SEBAGAI FASILITATOR PENDIDIKAN
POLITIK DI SMK PIRI 1 YOGYAKARTA
Nama : Pratiwi Hestu Utami
NIM : 13401244009
Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan



Yogyakarta, 28 Desember 2017

Reviewer

Cholisin, M.Si

NIP. 19550801 198503 1 002

Pembimbing

Suryato, M.Pd

NIP. 19670616 199403 1 002

PERANAN GURU PPKn SEBAGAI FASILITATOR PENDIDIKAN POLITIK DI SMK PIRI 1 YOGYAKARTA

THE ROLE OF TEACHER PPKn AS A FACILITATOR OF POLITICAL EDUCATION IN SMK PIRI 1 YOGYAKARTA

Pratiwi Hestu Utami dan Suyato, M.Pd

13401244009@student.uny.ac.id

Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FIS UNY

ABSTRAK

Artikel ini disusun berdasarkan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan; (1) bagaimana perspektif guru PPKn dalam pembelajaran PPKn sebagai pendidikan politik; (2) bagaimana peranan guru PPKn dalam memfasilitasi pendidikan politik di SMK PIRI 1 Yogyakarta; (3) apa hambatan yang dialami guru PPKn saat memfasilitasi pendidikan politik. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di SMK PIRI 1 Yogyakarta pada bulan Mei sampai Agustus 2017, dengan subjek penelitiannya adalah semua guru PPKn. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik pengujian keabsahan data menggunakan cross check. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis data logika induktif menurut Creswell yaitu membentuk tema, kategori, pola serta makna.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa; (1) perspektif guru PPKn dalam pembelajaran PPKn sebagai pendidikan politik adalah melaksanakan hak dan kewajiban warga negara dengan baik, berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum, berani menyampaikan pendapat dan berani tanggung jawab; (2) peranan yang dilakukan guru PPKn di SMK PIRI 1 Yogyakarta dalam rangka memfasilitasi pendidikan politik meliputi: (a) menanamkan nilai kepada peserta didik tentang pentingnya pendidikan politik, (b) memberikan materi dan menayangkan video-video terkait pentingnya pendidikan politik, (c) merancang dan memberikan usulan terkait fasilitas peserta didik kepada kepala sekolah, (d) bekerja sama juga dengan KPU untuk memberikan sosialisasi kepada peserta didik di SMK PIRI 1 Yogyakarta dengan tujuan untuk mengajak peserta didik sebagai pemilih pemula untuk tidak GOLPUT pada pemilihan umum, (e) memberikan lembar kerja yang berkaitan dengan pendidikan politik; (3) hambatan yang dialami guru PPKn di SMK PIRI 1 Yogyakarta dalam memfasilitasi pendidikan politik peserta didik pada saat pembelajaran antara lain, waktu yang kurang saat menyampaikan pelajaran, kemudian peserta didik yang tidak bisa dikondisikan, sikap apatis peserta didik terhadap pendidikan politik. Selain hambatan pada saat pembelajaran guru juga mengalami hambatan diluar pembelajaran yaitu, kurangnya anggaran biaya yang diberikan oleh sekolah untuk memfasilitasi peserta didik terkait pendidikan politik, penguasaan materi guru PPKn yang terbatas, metode pembelajaran yang kurang menarik.

Kata kunci : Peranan Guru PPKn, Fasilitator, Pendidikan Politik.

ABSTRACT

This study aims to describe; (1) How the perspective of PPKn teachers in PPKn learning as political education; (2) How the role of PPKn teachers in facilitating political education in SMK PIRI 1 Yogyakarta; (3) What are the obstacles faced by PPKn teachers when facilitating political education.

The type of this research is descriptive with qualitative approach. This research was conducted at SMK PIRI 1 Yogyakarta in May until August 2017, with the subject of research is all the teachers of PPKn. Data collection in this research use interview technique and documentation. Techniques of testing the validity analysis according to Creswell that forming theme, category, pattern and meaning.

The result showed that; (1) The perspektive of PPKn teachers in learning of PPKn as political education is to exercise the rights and obligations of the citizens well, to participate actively in elections, to dare to express opinions and to take responsibility; (2) In thr role of the PPKn teachers at SMK PIRI 1 Yogyakarta in order to facilitate political education includes: (a) inculcating the value to learners about the importance of political education; (b) providing material and broadcasting videos on yhe importance of political aducation; (c) to design on the provide proposals related to student facilities to the principal; (d) cooperate also with the KPU to provide socialization to students in SMK PIRI 1 Yogyakarta with the aim to invite learners as beginers voters not to GOLPUT in general elections; (e) provides worksheet related to polotical education; (3) Obstacles experienced by PPKn teachers in SMK PIRI 1 Yogyakarta in facilitating the political education of learners at the time of learning, among others, less time when delivering lessons, then learners who can not be conditioned, apathy of learners to political education. In addition to obstacles in the learning of the teachers also experience barriers beyond the learning that is, the lack of budgetary costs provided by schools of facilitate learners related to political education, mastery of limited PPKn teachers, less interesting learning methods.

Keyword: Role of PPKn Teachers, Facilitator, Political Education.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang manusia yang berkontribusi penting dalam membangun dan memajukan peradaban bangsa. Oleh karena itu sudah seyakinya pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia adalah dengan perbaikan sistem pendidikan. Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Seiring dengan era globalisasi, peranan pendidikan dalam kehidupan dan kemajuan manusia semakin dirasa penting, karena semakin perlu bagi manusia termasuk pendidik untuk senantiasa mengembangkan pemahaman mengenai pendidikan (Dwi Siswoyo, 2013:54). Oleh karena itu pendidik dituntut untuk selalu mengembangkan kemampuan diri serta wawasannya sesuai dengan kompetensinya. Berhasil atau tidaknya pendidikan yang dialami peserta didik juga dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Nur

Yati (2014) menyatakan bahwa Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri, terdiri atas kesehatan jasmani dan rohani, intelegensi dan bakat, minat dan motivasi, serta cara belajar seseorang. Faktor Eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri, terdiri atas keluarga (tinggi rendahnya pendidikan orang tua, besar kecilnya penghasilan, cukup atau kurangnya perhatian dan bimbingan orang tua, rukun atau tidaknya kedua orang tua, tenang atau tidaknya situasi dalam rumah), sekolah (kualitas guru, peran guru, model mengajarnya, pendekatan yang digunakan guru, kesesuaian kurikulum dengan kemampuan peserta didik, keadaan fasilitas/perlengkapan di sekolah, keadaan ruangan, jumlah murid per kelas, pelaksanaan tata tertib sekolah, dan sebagainya), Peran guru merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu pendidikan peserta didik. Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1, bahwa peran guru sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Pentingnya peran guru dalam proses pendidikan juga tercermin pada pola tingkah laku yang diharapkan dalam berbagai interaksinya, baik dengan peserta didik (yang terutama), sesama guru maupun dengan staf yang lain.

Dunia pendidikan terus berkembang seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut menuntut peran guru di sekolah sebagai sosok individu yang menjadi salah satu sumber inspirasi peserta didik dalam mencapai keberhasilan yang dicita-citakan. Adapun peranan guru dalam kegiatan belajar mengajar diantaranya yaitu :

1. Fasilitator, guru dalam hal ini akan memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar dengan bersemboyankan Tut Wuri Handayani (Sardiman A.M, 2010: 115-225)
2. Informator, sebagai pelaksana cara mengajar informative, laboratorium, studi lapangan dan sumber informasi kegiatan akademik maupun umum.
3. Organisator, Pengelola kegiatan akademik, silabus, workshop, jadwal pelajaran dan lain-lain.
4. Motivator, peranan guru disini sangat penting artinya dalam meningkatkan kegairahan dan mengembangkan kegiatan belajar siswa.
5. Pengarah/director, Jiwa kepemimpinan bagi guru dalam peranan ini lebih menonjol, guru dalam ini harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan.
6. Inisiator, guru dalam ini sebagai pencetus ide-ide dalam proses belajar.
7. Transmitter, dalam kegiatan belajar guru juga akan bertindak selaku penyebar kebikjaksanaan pendidik dan pengetahuan.
8. Mediator, Guru sebagai mediator dapat diartikan sebagai penengah dalam kegiatan belajar siswa.
9. Evaluator, guru mempunyai otoritas untuk menilai prestasi anak didik dalam bidang akademik maupun tingkah laku sosialnya.

Peran guru sangatlah penting dalam menentukan sejauh mana sikap siswa dalam bertingkah laku sebagai bagian dari masyarakat, terutama peran guru sebagai fasilitator. Dalam hal ini guru memberikan fasilitasi atau menjembatani peserta didik untuk mencapai tujuan yang berguna bagi peserta didik seperti fasilitator pendidikan politik. Guru sebagai fasilitator pendidikan

politik diharapkan dapat membentuk peserta didik menjadi warga negara yang mengerti hak dan kewajibannya.

Pendidikan politik sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun (Alfian, 1992: 235). Dalam rangka membentuk warga negara yang memahami dan menghayati nilai-nilai politik maka perlu adanya pemberian pendidikan politik kepada peserta didik. Melalui pendidikan politik dapat ditanamkan nilai-nilai dalam sistem politik yang ideal pada sebuah negara kepada peserta didik.

Pendidikan politik di Indonesia dapat dinyatakan sebagai rangkaian upaya edukatif yang sistematis dan intensional untuk memantapkan kesadaran politik dan kesadaran bernegara dalam menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai falsafah hidup serta landasan konstitusi. Selain itu juga melakukan upaya pembaharuan bangsa Indonesia untuk menegakkan suatu sistem politik yang demokratis, sehat dan dinamis. Pendidikan politik diadakan untuk mempersiapkan kader-kader politik yang mampu berfungsi baik di tengah perjuangan politik, serta untuk mendapatkan penyelesaian politik yang bisa memuaskan semua pihak, sesuai dengan konsep politik (Kartini Kartono, 2009: 68-69). Pentingnya pendidikan politik yaitu sebagai sarana untuk menyiapkan kader-kader politik sehingga bisa menjadi kekuatan yang kritis untuk melawan kondisi-kondisi yang tidak sehat, buruk, tidak adil dan tidak wajar. Oleh karena itu sudah seharusnya peserta didik di SMA/SMK difasilitasi pendidikan politik yang tepat oleh guru di SMA/SMK. Pendidikan Kewarganegaraan yang salah satu ranahnya adalah politik menjadi mata pelajaran yang tepat untuk menyosialisasikan politik kepada peserta didik. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-

hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Cholisin, 2015: 1). Oleh karena itu Pendidikan kewarganegaraan dapat dijadikan wadah bagi peserta didik untuk memperoleh pendidikan politik sesuai dengan sistem politik yang ada di Indonesia. Selain itu, PPKn memiliki fungsi sebagai pendidikan multidimensi, karena memiliki visi sebagai nation and character building, ilmu politik sebagai akar keilmuan dan sebagai kajian interdisipliner, sebagai pendidikan politik, karakter, demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM), anti korupsi sebagai misi dari PPKn (Cholisin, 2015: 1-10).

James Coleman sebagaimana dikutip Cholisin (2015: 5-6) menjelaskan terkait PPKn atau latihan kewarganegaraan (civic training) merupakan bagian dari pendidikan politik yang menekankan bagaimana seorang warga negara yang baik berpartisipasi dalam kehidupan politik bangsanya. PPKn sebagai pendidikan politik bertujuan untuk membantu peserta didik menjadi warga negara yang secara politik dewasa dan ikut serta membangun sistem politik yang demokratis.

Generasi muda sekarang semakin banyak yang skeptis dan sinis atau apatis terhadap politik. Padahal dengan sifat yang apatis tersebut masyarakat bisa dibodohi oleh penguasa, jadi dalam hal ini peran guru PPKn sangat diharapkan dalam upaya memfasilitasi pendidikan politik kepada peserta didik agar peserta didik menjadi warga negara yang cerdas dalam memilih pemimpin yang amanah.

Sejalan dengan hal tersebut, peran guru PPKn sebagai fasilitator pendidikan politik seharusnya dapat dimaksimalkan mengingat pengetahuan politik sangat dibutuhkan untuk membentuk kesadaran politik peserta didik. Fasilitator bisa dikatakan berjalan baik apabila fasilitator mampu membuat peserta didik untuk bekerjasama, berkomunikasi secara terbuka, pengembangan diri, perubahan sosial, dapat menguasai emosi dan sensitivitas, kesadaran diri, persepsi social, dan eksplorasi diri. Namun hal ini berbeda

dengan permasalahan yang ditemukan di SMK PIRI 1 Yogyakarta di mana peran guru PPKn dalam memfasilitasi pendidikan politik untuk peserta didik masih kurang maksimal. Hal ini dikarenakan guru PPKn hanya berperan sebagai transmisi saja (hanya sekedar mengajar), tetapi atau belum sebagai fasilitator atau memfasilitasi pendidikan politik terhadap peserta didik. Kenyataan yang dapat dilihat di sekolah ini yakni peserta didik masih acuh tak acuh dengan sistem politik, misalnya peserta didik masih merasa acuh tak acuh dan bersikap pasif terhadap pemilihan umum (pemilu). Padahal pemilu merupakan salah satu bentuk dari pendidikan politik. Pasifnya sikap peserta didik terhadap pemilu dapat menunjukkan bahwa guru belum mampu menjadi tempat pengembangan diri dan perubahan sosial sebagaimana yang seharusnya dilakukan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari narasumber guru PPKn SMK PIRI 1 Yogyakarta, Ibu Bakti yang menyatakan bahwa kesadaran peserta didik tentang politik masih rendah meskipun diyakini peserta didik cukup memahami pengetahuan politik dalam pembelajaran PPKn. Kepemimpinan peserta didik terhadap diri sendiri maupun peserta didik lain juga masih kurang. Kurangnya kepemimpinan peserta didik terhadap diri sendiri terlihat pada adanya sebagian peserta didik yang tidak mematuhi peraturan sekolah dan sulit untuk diarahkan. Dalam pembelajaran PPKn ketika diskusi kelompok masih terdapat peserta didik yang bersikap pasif dan enggan mengeluarkan pendapat. Terlebih adanya peserta didik yang gaduh selama proses pembelajaran maupun diskusi sedang berlangsung. Adanya peserta didik yang gaduh dan tidak memperhatikan guru tersebut menunjukkan bahwa peserta didik kurang menghargai guru. Seorang ketua kelas pun yang diharapkan dapat memimpin peserta didik lain untuk tidak membuat kegaduhan selama proses pembelajaran berlangsung terkadang tidak peduli pada sikap temannya dan justru ikut gaduh. Demikian pula halnya dengan musyawarah kelas yang kurang terlaksana karena peserta

didik cenderung lebih memberlakukan sistem voting ketika tidak tercapai kesepakatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sikap politik peserta didik belum terbentuk dan belum mendukung berjalannya sistem politik yang demokratis. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peranan guru PPKn sebagai fasilitator pendidikan politik di SMK PIRI 1 Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena peneliti ingin memaparkan makna yang menjadi rumusan masalah. Penelitian ini dilaksanakan di SMK PIRI 1 Yogyakarta. Penelitian mengenai “ Peranan guru PPKn sebagai Fasilitator Pendidikan Politik di SMK PIRI 1 Yogyakarta” dilaksanakan selama 4 (empat) bulan yaitu: mulai bulan Mei sampai Agustus 2017.

Jenis data ini merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui proses wawancara dan dokumentasi. Penentuan subjek penelitian yang digunakan sebagai sumber data primer menggunakan teknik purposive, yakni dengan kriteria dalam penelitian ini adalah semua guru PPKn yang mempunyai peran langsung mengajar peserta didik SMK PIRI 1 Yogyakarta.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara kombinasi, yaitu gabungan antara wawancara terstruktur dan wawancara bebas atau tak terstruktur. Pada penelitian ini dokumentasi digunakan untuk memperoleh data melalui dokumen - dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu peran guru PPKn sebagai fasilitator pendidikan politik di SMK PIRI 1 Yogyakarta. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dari guru PPKn SMK PIRI 1 Yogyakarta.

Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan data yang digunakan adalah cross check data. Hasil wawancara antar subjek penelitian di cross check dengan hasil dokumentasi yang sudah terkumpulkan, selain itu juga sebagai pembanding hasil wawancara antar subjek penelitian. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis induktif dalam penelitian ini merujuk pada logika induktif dalam penelitian kualitatif yang diperkenalkan oleh John. W Creswell (2015: 96). Langkah-langkah logika induktif dalam penelitian kualitatif sebagai metode data ini antara lain:

1. Peneliti mengemukakan generalisasi-generalisasi atau teori-teori dari literatur-literatur dan pengalaman-pengalaman pribadinya.
2. Peneliti mencari pola-pola umum, generalisasi-generalisasi atau teori-teori dari tema-tema atau kategori-kategori yang dibuat.
3. Peneliti menganalisis data berdasarkan tema-tema dan kategori-kategori
4. Peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka pada partisipan dan merekam catatan lapangan
5. Peneliti mengumpulkan informasi (misalnya dari wawancara atau observasi)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Deskripsi lokasi penelitian

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PIRI 1 Yogyakarta yang beralamat di Jalan Kemuning No.14 Gondokusuman, Baciro, Yogyakarta. SMK PIRI 1 Yogyakarta memiliki akses yang mudah dijangkau karena terletak di pusat kota Daerah Istimewa Yogyakarta. SMK PIRI 1 Yogyakarta berada dibawah Yayasan Perguruan Islam Republik Indonesia (PIRI) yang terletak satu kompleks dengan SMA PIRI 1, SMK PIRI 2, dan SMP PIRI 1, SMK PIRI 1 Yogyakarta. SMK PIRI 1 Yogyakarta memiliki enam program keahlian yang terbagi menjadi beberapa program didik: keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL), Teknik Kendaraan Ringan

(TKR), Teknik Audio Video (TAV), Teknik Sepeda Motor (TSM), Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ), dan Teknik Pemesinan (TP). Untuk proses belajar mengajar teori umum dilaksanakan di dalam kelas dan kegiatan pembelajaran program keahlian dan praktik berada di bengkel dan laboratorium di SMK PIRI 1 Yogyakarta.

2. Deskripsi Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah semua guru PPKn yang mengajar SMK PIRI 1 Yogyakarta Kelas X, Kelas XI dan Kelas XII. Pendidikan terakhir subjek penelitian rata-rata Strata-1 (S1) dan

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peneliti mengidentifikasi tema utama dari proses analisis data yang dilakukan. Tema-tema tersebut antara lain: (1) Perspektif Pendidikan Politik Guru PPKn dalam Pembelajaran PPKn; (2) Peranan Guru PPKn sebagai Fasilitator Pendidikan Politik; (3) Hambatan Yang dialami Guru PPKn SMK PIRI 1 Yogyakarta dalam menjalankan Perannya sebagai Fasilitator Pendidikan Politik.

Pembahasan ini memuat tentang interpretasi hasil, keterbatasan penelitian. Perbandingan antara hasil penelitian ini dengan teori, konsep, maupun hasil penelitian sebelumnya akan disajikan pada bagian interpretasi hasil, sedangkan perbandingan proses penelitian yang terlaksana dengan rencana penelitian akan diuraikan dalam keterbatasan penelitian.

1. Perspektif guru PPKn dalam pembelajaran PPKn sebagai pendidikan politik.

Perspektif tentang pendidikan politik dipahami guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai hak dan

kewajiban warga negara. Yakni dengan melaksanakan hak dan kewajiban warga negara semisal berani menyampaikan pendapat, tanggung jawab, dapat memimpin diri sendiri, serta ikut aktif dalam pemilihan umum. Data tersebut didukung dengan hasil wawancara yakni adanya pemilihan ketua OSIS di sekolah SMK PIRI 1 Yogyakarta, pemilihan osis melibatkan guru, dimulai pencarian kandidat dari kelas mengajukan calon dipilih anggota osis, kemudian memunculkan beberapa orang, selanjutnya dibawa ke forum guru, dan dari forum guru tersebut memilih dan diadakan pemungutan suara secara terbuka. Berdasarkan dokumentasi, khususnya RPP yang dibuat oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan telah ditemukan substansi dengan kompetensi yakni memahami, menerapkan, menghayati, mengamalkan dan menganalisis. Serta dalam pelaksanaan pembelajaran guru memberikan pengertian, tujuan, dan mempelajari pokok bahasan.

a. Kondisi Kesadaran Politik Peserta Didik yang Dipahami oleh Guru PPKn di SMK PIRI 1 Yogyakarta.

Keadaan Kesadaran Politik peserta didik yang dipahami oleh subjek penelitian bahwa saat ini kesadaran politik mulai terganggu dengan adanya budaya money politik. Kedua yakni kurangnya partisipasi peserta didik. Kondisi Kesadaran Politik peserta didik saat ini sedikit terganggu dengan adanya money politik, karena dengan politik peserta didik menganggap bahwa politik itu tidak jujur, semisal adanya pemilihan kepala desa, yang mulanya peserta didik sadar akan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara tetapi jadi malas memilih dalam pemilihan umum karena politik dianggap tidak jujur, tetapi salah satu subjek penelitian selaku narasumber

juga menceritakan pengalamannya mengenai money politik dan beliau menghimbau untuk menerimanya saja saat diberikan uang dari salah satu calon pemilu, tapi tidak untuk dimasukkan ke perut, alangkah lebih baiknya disumbangkan ke masjid dan lain sebagainya dan dengan seperti itu adalah cara memerangi money politik. Selain itu apabila dilihat dari kasat mata mungkin kesadaran politik peserta didik masih disepelekan. Karena substansi materi ppkn yang termuat dalam mata pelajaran PPKn dianggap pelajaran paling kecil dan diabaikan karena tidak masuk Ujian Nasional, serta hanya menganggap pelajaran sebatas teori dan penerapan maupun aplikasinya masih kurang.

Dengan demikian peneliti menginterpretasikan bahwa pemahaman guru Pendidikan Kewarganegaraan terkait dengan kondisi kesadaran politik peserta didik memang masih kurang. Pemicunya karena adanya money politik serta pemahaman tentang substansi nilai politik yang termuat dalam pembelajaran kewarganegaraan masih disepelekan oleh peserta didik.

b. Pentingnya Pendidikan Politik Diintegrasikan Kedalam Mata Pelajaran PPKn

Guru dalam memfasilitasi pendidikan politik diantaranya melalui pembelajaran di kelas, yakni pada pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan politik diintegrasikan di dalamnya. Terbentuk dua pola pada tema ini yakni, pertama subjek penelitian menyebutkan bahwa pendidikan politik sangat penting untuk diintegrasikan ke dalam mata pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk warga negara yang baik agar sadar akan pendidikan politik karena politik dan sekolah itu sangat berpengaruh sekali,

politik tanpa sekolah politik tidak jalan, karena untuk menyiapkan kadet-kader dari sekolah. Kemudian pola yang kedua menyatakan bahwa tujuan PPKn juga merupakan tujuan politik, menurut subjek penelitian menyatakan politik merupakan hak dan kewajiban warga negara, sedangkan Pendidikan Kewarganegaraan itu mempunyai tujuan utama agar peserta didik mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara antara lain haknya dibidang politik.

Dengan demikian peneliti menganggap perlu pendidikan politik diintegrasikan ke dalam mata pendidikan PPKn untuk membentuk warga negara baik agar sadar akan pendidikan politik karena politik dan sekolah itu sangat berpengaruh sekali, politik tanpa sekolah politik tidak berjalan, karena untuk menyiapkan calon pemimpin dari sekolah, selain itu pendidikan politik diintegrasikan kedalam PPKn karena tepat atau sesuai dengan tujuan PPKn. Pendidikan politik penting karena peserta didik merupakan generasi penerus bangsa, pendidikan politik dapat membentuk kesadaran politik, partisipasi warga negara, cinta tanah air, untuk mewujudkan masyarakat yang baik serta peduli akan politik.

2. Peranan Guru PPKn sebagai Fasilitator Pendidikan Politik

Pemahaman pendidikan politik yang baik tidak langsung tumbuh dalam diri peserta didik, melainkan melewati proses untuk bisa menghadirkan kejiwaan politik dalam dirinya. Hal ini tentunya tidak terlepas dari cara guru dalam memfasilitasi pendidikan politik pada peserta didik. Pemberian contoh merupakan penyeimbang dalam proses pembelajaran begitu juga dalam memfasilitasi pendidikan politik. Menurut subjek penelitian, cara untuk membuka pemikiran peserta didik terkait

pentingnya pendidikan politik yakni dengan panutan, semisal mengenang para pejuang bangsa dibidang politik, menayangkan film dokumenter dimana pada film atau video tersebut dapat dilihat bagaimana penguasa politik mengatur dunia, serta ketika politik disalahgunakan maka orang – orang kecil dapat ditindas oleh penguasa. Untuk itu peneliti rasa peserta didik dapat terbuka pikirannya sehingga dia jadi peduli dengan politik, inilah salah satu cara guru dalam memfasilitasi pendidikan politik.

Selain itu , disadari ataupun tidak banyak guru yang salah kaprah atau salah mengartikan peranannya sebagai seorang guru, beberapa guru masih beranggapan peranan guru seolah-olah hanya mengajar semata dan mengabaikan peranan yang lainnya, termasuk salah satunya yaitu peranan sebagai fasilitator. (Peter Jarvis, 2006: 100) menyatakan bahwa Fasilitator bekerja terhadap diri sendiri dan kerjasama, penilaian informasi dan berkomunikasi secara terbuka, pengembangan diri dan perubahan sosial, bisa menguasai emosi dan sensitivitas dalam diri, kesadaran diri dan persepsi sosial, kepercayaan diri dan orang lain. Fasilitator bertindak sebagai panduan membantu peserta mengeksplorasi pengetahuan diri mereka sendiri, transpersonal (menggabungkan pengalaman spiritual dan religius dari orang) dan pengetahuan sosial dipandang berada di luar individu dan sering eksklusif disampaikan oleh orang-orang yang tahu untuk mereka yang tidak tahu.

Maksud dari pendapat Peter Jarvis tersebut yaitu bahwa fasilitator dikatakan berjalan dengan baik yaitu ketika sudah mampu bekerja terhadap arah diri sendiri dan kerjasama, sudah

mampu bekerja terhadap arah diri sendiri yang dimaksud bisa bermanfaat atau berguna dengan baik bagi diri sendiri, juga bisa dipakai kerjasama dengan orang lain dan sama-sama menguntungkan tidak ada yang dirugikan. Selanjutnya penilaian informasi dan berkomunikasi secara terbuka yang dimaksud fasilitator sebagai penilaian informasi dan komunikasi terbuka yaitu fasilitator dapat dijadikan informasi yang valid atau benar serta dapat dipercaya, dan bisa dijadikan komunikasi terbuka tidak ada kebenaran yang disembunyikan. Pengembangan diri dan perubahan sosial, bisa menguasai emosional dan sensitivitas dalam diri, kesadaran diri dan persepsi sosial, perayaan diri dan orang lain. Fasilitator bertindak sebagai panduan membantu peserta mengeksplorasi pengetahuan diri mereka sendiri, transpersonal (menggabungkan pengalaman spiritual dan religius dari orang) dan pengetahuan sosial dipandang berada di luar individu dan sering eksklusif disampaikan oleh orang-orang yang tahu untuk mereka yang tidak tahu. Sedangkan sebagaimana yang berjalan di SMK PIRI 1 Yogyakarta berdasarkan hasil wawancara terhadap narasumber bahwa Pendidikan Politik diterapkan atau dimulai sejak kelas 1 semester 2 sudah dikenalkan pengertian pendidikan politik kepada peserta didik, sedangkan pada kelas 2 dikembangkan ke dalam mata pelajaran budaya politik. Guru PPKn memberikan materi-materi yang berkaitan dengan politik melalui kegiatan belajar mengajar (KBM) disesuaikan dengan materi-materi sesuai dengan SK/KD ada beberapa materi politik.

Mata pelajaran PPKn dianggap pelajaran paling kecil dan disepelekan karena tidak

masuk UN , dan masih menganggap pelajaran sebatas teori dan penerapannya masih kurang. Ibu Bekti menjelaskan, mungkin penerapan yang sesungguhnya nanti ketika sudah lulus pasti ada pengaruhnya, karena mungkin teori waktu di dapat di SMK disimpan dalam hati dan di aplikasikan setelah lulus sekolah. Sedangkan pendidikan politik di sekolah sudah berjalan, seperti OSIS melibatkan guru, di mulai pencarian kandidat dari kelas mengajukan calon dipilih anggota OSIS, kemudian memunculkan beberapa orang, selanjutnya dibawa ke forum guru, dan dari forum tersebut memilih dan diadakan pemungutan suara secara terbuka. Kesadaran tentang politik masih apatis tapi Ibu Bekti yakin ilmu tersebut masih dapat diterima oleh peserta didik. Tapi memang tidak pernah di dengarkan, peserta didik yang sulit untuk dikondisikan. Guru PPKn di SMK 1 PIRI mencoba melakukan banyak upaya untuk menyadarkan tentang pentingnya pendidikan politik yaitu sebagai contoh membentuk forum guru ditingkat sekolah, merambah ke kota, sementara ini belum ada fasilitator dan hanya sebatas memberikan materi atau menayangkan video-video tapi untuk fasilitas langsung belum ada. Sejauh ini hanya sekedar merancang dan memberi usul terkait fasilitas peserta didik kepada kepala sekolah, serta diperbanyak menampilkan video-video dan pernah bekerja sama juga dengan KPU untuk mengadakan sosialisasi di SMK PIRI 1 Yogyakarta, dan dihadapkan dengan peserta didik dengan tujuannya untuk mengajak pemilih pemula untuk tidak mengikuti Golongn Putih (GOLPUT) pada pemilih pemula

3. Hambatan yang Dialami Guru PPKn dalam Memfasilitasi Pendidikan Politik Di SMK PIRI 1 Yogyakarta

Dalam memfasilitasi pendidikan politik tentunya akan menghadapi berbagai faktor yang menghambat dalam prosesnya. Hambatan yang dialami guru dalam menjalankan peranannya untuk memfasilitasi pendidikan politik peserta didik diantaranya yakni peserta didik yang apatis saat dikelas. Menurut subjek penelitian Hambatan terbesar sendiri yang dialami guru PPKn, yaitu sikap peserta didik yang menjadi hambatan, apa yang disampaikan guru masuk saja tetapi tidak didengarkan dengan baik, terkadang guru sampai malas karena sikap peserta didik di SMK PIRI 1 Yogyakarta sulit dikondisikan. Hambatan lain yang dialami guru PPKn yaitu waktu, sering kali guru kehabisan waktu dalam menyampaikan materi karena peserta didik yang gaduh.

Adapun analisis hambatan yang dialami guru PPKn sebagai fasilitator pendidikan di SMK PIRI 1 Yogyakarta sesuai teori yang peneliti temukan, yaitu teori peter Jarvis. Diantaranya sebagai berikut :

a. Hambatan yang dialami guru PPKn di SMK PIRI 1 Yogyakarta dalam usahanya untuk menjadikan peserta didik mandiri yaitu, tugas yang diberikan kepada peserta didik sering kali di abaikan atau peserta didik menyepelekan tidak dikerjakan secara mandiri sesuai keinginan guru, peserta didik dituntut aktif internet dengan tujuan supaya mencari materi yang berkaitan dengan pembelajaran tetapi kebanyakan peserta didik membuka internet bukan membuka bahan pembelajaran melainkan membuka hal-hal lain dan bermain sendiri, ketika peserta didik difasilitasi dan diberikan contoh-contoh langsung peserta didik sering kali tidak memperhatikan dan tidak memperdulikan, ketika diajak berdiskusi bersama dengan harapan peserta didik dapat aktif serta mandiri

namun kenyataannya diskusi tidak berjalan dengan baik serta peserta didik tidak aktif dalam diskusi, sehingga kemandirian juga belum terbentuk dengan baik.

b. Hambatan yang dialami guru PPKn di SMK PIRI 1 Yogyakarta dalam usahanya untuk menjadikan peserta didik dapat menyaring informasi serta bisa komunikasi secara terbuka yaitu, materi yang diberikan oleh guru melalui teori-teori disekolah dengan cara guru memberikan materi-materi yang berkaitan dengan politik melalui kegiatan belajar terkadang kebanyakan peserta didik di SMK Piri 1 Yogyakarta tidak merespon apa yang disampaikan oleh guru. Pemahaman-pemahaman yang diberikan kepada peserta didik belum terserap sepenuhnya, sehingga tujuan untuk membentuk karakter peserta didik sejak dini, sehingga ketika karakter peserta didik sudah terbentuk maka otomatis peserta didik dapat menyaring informasi dan bisa membedakan mana informasi yang salah atau buruk serta mana yang informasi yang benar atau baik, serta ketika karakter sudah terbentuk dengan baik maka peserta didik dapat berkomunikasi secara terbuka atau mampu menyampaikan pendapat di depan umum. Selain itu, peserta didik yang ramai atau gaduh sendiri di kelas juga menjadi hambatan tersendiri dalam memberi materi atau pemahaman kepada peserta didik.

c. Hambatan yang dialami guru PPKn di SMK PIRI 1 Yogyakarta dalam usahanya untuk menjadikan peserta didik dapat mengembangkan diri mengikuti perubahan sosial yaitu, lembar kerja yang sudah didesain guru dan diberikan kepada peserta didik sehingga peserta didik dapat mengembangkan diri. Peserta didik

belum punya inisiatif atau kreatifitas untuk menyelesaikan lembar kerja yang telah diberikan guru.

d. Hambatan yang dialami guru PPKn di SMK PIRI 1 Yogyakarta dalam usahanya untuk menjadikan peserta didik dapat menguasai emosi dan sensitivitas dalam diri, kesadaran diri dan persepsi sosial, yaitu berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber usaha yang dilakukan dengan cara pemberian pemahaman kepada peserta didik melalui pembelajaran dikelas belum bisa maksimal karena hambatan terbesarnya adalah peserta didik yang ramai dan gaduh sendiri dikelas tidak mendengarkan pemahaman yang diberikan guru.

e. Hambatan yang dialami guru PPKn di SMK PIRI 1 Yogyakarta dalam usahanya untuk menjadikan peserta didik mempunyai kesadaran diri dan kepekaan sosial yaitu, dengan cara yang dilakukan guru belum dapat diterima oleh peserta didik dengan baik, cara yang dilakukan guru meliputi mengintegrasikan pendidikan politik kedalam mata pelajaran PPKn dengan alasan politik merupakan hak dan kewajiban warga negara, sedangkan PPKn itu mempunyai tujuan utama agar peserta didik tahu hak dan kewajibannya sebagai warga negara antara lain haknya dibidang politik serta agar peserta didik mempunyai kesadaran diri dan kepekaan sosial, ternyata belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena peserta didik belum mempunyai kesadaran diri dan kepekaan sosial.

f. Hambatan yang dialami guru PPKn di SMK PIRI 1 Yogyakarta dalam usahanya untuk menjadikan peserta didik dapat menghargai diri sendiri dan orang lain yaitu, peserta didik belum dapat memanfaatkan kesempatan dengan baik, misal waktu presentasi di

depan kelas, banyak peserta didik yang masih pasif, baik dalam hal bertanya maupun menjawab, waktu pemilihan ketua osis, peserta didik disuruh presentasi di depan guru, juga presentasi di depan teman peserta didik di kelas juga masih belum berjalan sesuai yang diharapkan. Peserta didik presentasi di depan guru diharapkan peserta didik bisa percaya diri dan dapat menghargai dirinya sendiri serta muncul rasa kepercayaan bahwa dia mampu. Dapat dikatakan hambatan dalam usaha guru untuk menjadikan peserta didik percaya diri dan menghargai orang lain dikarenakan peserta didik belum mampu memanfaatkan kesempatan yang diberikan kepada peserta didik dengan baik.

Dengan demikian peneliti menarik kesimpulan bahwa hambatan yang dialami guru PPKn di SMK PIRI 1 Yogyakarta dalam memfasilitasi pendidikan politik peserta didik pada saat pembelajaran antara lain, waktu yang kurang saat menyampaikan pelajaran, kemudian peserta didik yang tidak bisa dikondisikan, sikap apatis peserta didik terhadap pendidikan politik. Selain hambatan pada saat pembelajaran guru juga mengalami hambatan diluar pembelajaran yaitu kurangnya anggaran biaya yang diberikan oleh sekolah untuk memfasilitasi peserta didik terkait pendidikan politik, penguasaan materi guru PPKn yang terbatas, metode pembelajaran yang kurang menarik sehingga peserta didik banyak yang pasif saat pembelajaran berlangsung.

2. Keterbatasan penelitian

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan diantaranya sebagai berikut:

- a. Dalam mengungkap data baik wawancara, maupun dokumentasi belum dapat mengungkap permasalahan secara menyeluruh dan mendalam karena keterbatasan waktu dalam meakukan penelitian di SMK PIRI 1 Yogyakarta,

penelitian dilaksanakan antara bulan Mei sampai Agustus, sehingga dimungkinkan terdapat data lain diluar bulan tersebut untuk diteliti.

- b. Keterbatasan waktu yang dialami peneliti dalam penelitian ini menjadikan peneliti belum sempat meneliti secara lebih mendalam terkait peranan guru PPKn dalam rangka memfasilitasi pendidikan politik.
- c. Hasil kajian dari penelitian ini tidak bisa untuk (mengeneralikan) atau tidak dapat disamakan dengan hasil penelitian dari sekolah lain meskipun meneliti tentang peranan guru PPKn dalam memfasilitasi pendidikan politik, dimungkinkan hasilnya pun akan berbeda.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peranan guru PPKn dalam memfasilitasi pendidikan politik di SMK PIRI 1 Yogyakarta dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendidikan politik menurut subjek penelitian adalah melaksanakan hak dan kewajiban warga negara dengan baik kemudian ikut aktif dalam pemilihan umum, yakni dengan melaksanakan hak dan kewajiban warga negara semisal berani menyampaikan pendapat, tanggung jawab, dapat memimpin diri sendiri, serta ikut aktif dalam pemilihan umum, semisal, pada waktu pemilihan ketua OSIS di sekolah SMK PIRI 1 Yogyakarta.
2. Peranan yang dilakukan guru PPKn di SMK PIRI 1 Yogyakarta dalam rangka memfasilitasi pendidikan politik meliputi: (a) menanamkan nilai kepada peserta didik tentang pentingnya pendidikan politik, (b) memberikan materi dan menayangkan video-video terkait pentingnya pendidikan politik, (c) merancang dan memberikan usulan terkait fasilitas peserta didik kepada

kepala sekolah, (d) bekerja sama juga dengan KPU untuk memberikan sosialisasi kepada peserta didik di SMK PIRI 1 Yogyakarta dengan tujuan untuk mengajak peserta didik sebagai pemilih pemula untuk tidak GOLPUT pada pemilihan umum, (e) memberikan lembar kerja yang berkaitan dengan pendidikan politik.

3. Hambatan yang dialami guru PPKn di SMK PIRI 1 Yogyakarta dalam memfasilitasi pendidikan politik peserta didik pada saat pembelajaran antara lain, waktu yang kurang saat menyampaikan pelajaran, kemudian peserta didik yang tidak bisa dikondisikan, sikap apatis peserta didik terhadap pendidikan politik. Selain hambatan pada saat pembelajaran guru juga mengalami hambatan diluar pembelajaran yaitu kurangnya anggaran biaya yang diberikan oleh sekolah untuk memfasilitasi peserta didik terkait pendidikan politik, penguasaan materi guru PPKn yang terbatas, metode pembelajaran yang kurang menarik sehingga peserta didik banyak yang pasif saat pembelajaran berlangsung.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas mengenai Peranan Guru PPKn sebagai fasilitator pendidikan politik di SMK PIRI 1 Yogyakarta, maka dalam penelitian ini dikemukakan beberapa saran yang dinilai bermanfaat untuk beberapa pihak, di antaranya sebagai berikut.

1. Bagi Sekolah

a. Pihak sekolah hendaknya memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung peranan guru PPKn dalam memfasilitasi pendidikan politik terhadap siswa. Seperti rutin mendatangkan KPU provinsi untuk melakukan sosialisasi terkait pemilihan umum agar dapat mendorong peserta didik berpartisipasi secara aktif dalam pemilihan umum.

b. Pihak sekolah hendaknya melakukan kontrol pada proses pembelajaran terkhusus pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan agar peserta didik lebih terarah serta mudah dikondisikan.

c. Pihak sekolah hendaknya lebih memperhatikan masalah-masalah dalam proses memfasilitasi pendidikan politik dan memberikan solusi bagi guru PPKn sebagai fasilitator pendidikan politik.

2. Bagi Guru

a. Guru hendaknya menjadi contoh yang baik bagi peserta didik baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, terutama dalam pendidikan politik serta berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum.

b. Guru hendaknya lebih mengembangkan kreatifitas dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan khususnya pada pendidikan politik.

c. Guru hendaknya lebih berinovasi dalam melakukan pendekatan kepada siswa dalam proses memfasilitasi nilai-nilai pendidikan politik kepada peserta didik agar ilmu yang disampaikan dapat dimengerti dan dilaksanakan oleh peserta didik.

3. Bagi Peserta Didik

a. Peserta didik hendaknya dalam mengikuti pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan tertib dan tidak ramai sendiri serta menghargai setiap penyampaian materi oleh guru.

b. Peserta didik hendaknya dapat menerapkan materi, pengetahuan serta nilai-nilai pendidikan politik yang disampaikan oleh guru, seperti misalnya aktif dalam politik dan berpolitik yang cerdas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian. (1992). *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Creswell, J.W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih antara Lima Pendekatan (edisi ke-3)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cholisin. (2015). *PKn (Civic Education) sebagai Pendidikan Politik, Pendidikan Demokrasi, Pendidikan HAM*. Diklat. FIS UNY.
- Darmadi, H. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*. Jakarta: PT Gramedia

Emzir. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data. Ed. 1 Cet.4. Jakarta: Rajawali Press.

Gage dan Berliner. yang diakses dari www.dosenpendidikan.com pada tanggal 5 April pukul 14.17

Jarvis, P. (2006). 2ND Edition The Theory & Practice of Teaching. New York : Routledge.

Nuryati. 2014. Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Prestasi

Belajar Siswa. Diakses dari m.kompasiana.com pada tanggal 28 Maret 2017 pukul 15.30 WIB

Sardiman A.M. 2004. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Siswoyo, D. (2013). Ilmu Pendidikan. Yogyakarta: UNY Press

